

POLITIK ETNISITAS : SURVIVALITAS ETNIS MELAYU MELALUI MAJELIS ADAT BUDAYA MELAYU DALAM PERPOLITIKAN DI KALIMANTAN BARAT

Jovano Deivid Oleyver Palenewen
jovano.palenewen@fisip.upr.ac.id

ABSTRAK

Pasca reformasi politik etnisitas muncul ke permukaan dalam pusaran politik Indonesia, dengan terjadinya perubahan sistem politik. Salah satu fenomena politik yang muncul menguatnya kebijakan desentralisasi di daerah yang berimplikasi pada kebangkitan politik lokal di Indonesia. Tulisan ini membahas tentang pergerakan politik etnis melayu di Kalimantan barat ketika dalam lokalitas berdampingan dengan suku Dayak. Ini menjadi sesuatu yang unik Ketika etnis melayu bisa memainkan peran yang positif melalui Majelis Adat Budaya Melayu Bersama dengan Suku Dayak di Kalimantan Barat yang merupakan suku pribumi atau suku asli di Kalimantan.

Kata kunci: Politik Etnisitas, Adat Melayu, Kalimantan Barat

PENDAHULUAN

Dilihat dari rentang waktu, ilmuwan sosial baru tertarik kepada isu politik identitas pada 1970-an, bermula di Amerika Serikat, ketika menghadapi masalah minoritas, jender, feminisme, ras, etnisitas, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang merasa terpinggirkan dan merasa teraniaya. Dalam perkembangan selanjutnya cakupan politik identitas ini meluas kepada masalah agama, kepercayaan, dan ikatan-ikatan kultural yang beragam¹. Negara Indonesia yang pluralis tidak lepas dari keberadaan politik identitas khususnya politik etnisitas. Hal ini tidak dapat dihindari karena masyarakat Indonesia terdiri dari ribuan suku yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia.

Di Indonesia, Politik identitas seakan bangkit menjadi isu sentral dan mengemuka pasca reformasi. Belajar dari kesalahan rezim sebelumnya yaitu Orde Baru, pemerintah transisi menerbitkan UU No.22/2001 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No.32/2004 dan yang terakhir saat ini UU No 23. Thn 2014 .Dalam hal ini, sentralisasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah diubah dengan memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi, 2012), 3.

Desentralisasi diharapkan mampu membawa kondisi yang lebih baik di daerah. Hal ini didasari pada pemikiran bahwa desentralisasi dapat membuka ruang dan mewadahi perbedaan-perbedaan atau pluralitas yang selama ini seakan ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Disinilah letak pentingnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola perbedaan-perbedaan tersebut menjadi kesatuan dalam bernegara bangsa.

Desentralisasi dianggap sebagai pilihan terbaik untuk meredam berbagai konflik yang akarnya telah lama tertanam di era Orde Baru. Selain itu, desentralisasi juga dipercaya akan mampu mensejahterakan rakyat di daerah. Dengan dasar pemikiran bahwa daerahlah yang paling tau akan apa yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri. Namun demikian, kenyataan yang terjadi jauh dari harapan. Otonomi Daerah malah menjadi pintu masuk kebangkitan politik identitas etnis². Politik etnisitas pada perjalanannya di beberapa daerah justru menimbulkan persaingan hingga konflik berkepanjangan. Tidak terkecuali di Kalimantan Barat, di mana pada awal reformasi, etnis Dayak dan etnis Melayu semakin kentara memainkan politik etnisitas. Etnis Dayak yang mulai bangkit dan menunjukkan keberhasilan dalam kancah perpolitikan lokal, membuat etnis Melayu merasa risau. Awalnya mereka lamban dalam merespon hal tersebut. Namun kemudian, muncul kesadaran dari etnis Melayu yang ada di Kalimantan Barat untuk membentuk Majelis Adat Budaya Melayu (MABM). Dalam paper ini, kemudian lebih lanjut ingin melihat seberapa jauh peran MABM dalam menjaga eksistensi etnis Melayu di Kalimantan Barat. Dilihat dari bagaimana mereka memainkan simbol-simbol untuk mendapat dukungan dan memobilisasi massa serta bagaimana strategi mereka untuk menanggapi politik etnisitas yang dimainkan etnis Dayak.

LANDASAN TEORI

Konsep Etnisitas

Secara umum etnisitas atau etnis berasal dari bahasa Yunani, *ethnos*, yang diterjemahkan sebagai bangsa atau suatu komunitas yang memiliki bahasa atau kebudayaan yang sama³ (Vick dan Ishiyama, 2013). Etnis (*ethnos*) pada masa Yunani Kuno digunakan untuk menunjuk perbedaan antara kelompok Yunani dan bukan Yunani atau orang asing dan pinggiran Yunani yang merupakan Orang Barbar. Secara lain Etnisitas adalah konsep kultural yang terpusat pada kesamaan norma, nilai, kepercayaan, simbol dan praktik kultural. Terbentuknya suku bangsa bersandar pada penanda kultural yang dimiliki secara bersama yang telah berkembang dalam konteks historis, sosial dan politis tertentu dan yang mendorong rasa memiliki yang sekurang-kurangnya didasarkan pada nenek moyang, mitologis yang sama. Sehingga pada esensinya Etnisitas terbentuk

²Soyjan Sjaf dkk, "Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Lokal", *Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6 No.2*(2012), 170-171.

³Vick dan Ishiyama, *Etnis dan Politik Identitas*, (Jakarta: Kencana, 2013), 362-363.

melalui relasi kekuasaan antar berbagai kelompok. Ia menandai relasi marginalitas, pusat dan pinggiran, dalam konteks perubahan bentuk dan situasi sejarah⁴. Dalam menjelaskan tentang Etnisitas terdapat beberapa perspektif yaitu pertama, Perspektif primordialisme yang melihat bahwa identitas sebagai bawahan lahir dan alamiah dalam konteks tertentu. Kedua, perspektif situasional yang di dalamnya terdapat pendekatan konstruksionis dan instrumentalis. Perspektif yang kedua ini melihat identitas etnis dikonstruksi secara sosial⁵ (Vick dan Ishiyama, 2013). Dalam pembahasan ini, etnisitas dipandang sebagai konstruksi sosial dan dikhususkan pada etnisitas sebagai Instrumen sebagai strategi politik, untuk mencapai tujuan, mengakses sumber daya serta meningkatkan status. Seperti yang disampaikan Cohen (1974) bahwa etnisitas sebagai instrument pada dasarnya dari produk simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan oleh pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Pada tulisan ini kami memfokuskan untuk melihat etnisitas sebagai suatu konstruksi sosial, dengan memakai pendekatan instrumentalis.

Pendekatan Instrumentalisme dalam Melihat Etnis

Di dalam pendekatan ini etnisitas dianggap sebagai suatu sumber dan kekuatan sosial, budaya dan politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan di dalam masyarakat. Salah satu pendekatannya adalah melihat kompetisi dari kelompok-kelompok elite dalam menguasai sumber-sumber dukungan massa sehinggamanipulasi berbagai simbol untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Lebihmenaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik ketikakelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut awal etnisitas⁶. Ronald Cohen (1978) juga menunjukkan bahwa etnisitas dapat dilihat secara sempit sebagai alat mobilisasi politik dengan batasan-batasan yang dapat diperluas dan dipersempit sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya ialah etnisitas dijadikan sebuah instrumen untuk dipakai dalam kegiatan politiknya. Bahkan dalam ini, etnisitas sebagai hasil dari strategi politik, yang biasanya untuk mencapai tujuan yang lain seperti kekuasaan politik akses sumberdaya dan meningkatkan status dan kekayaan.

Etnisitas pada Ruang Desentralisasi

Desentralisasi penting bagi sebuah negara. Sebagai bentuk upaya menghindari sistem yang totaliter. Kekuasaannya tidak terpusat, melainkan

⁴Chris Barker, *Cultural Studies : Teori dan Praktik*(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 205-206.

⁵Vick dan Ishiyama, *Etnis dan Politik Identitas* (Jakarta : Kencana, 2013), 363

⁶Handelman & Schemerhom seperti yg dikutip dalam Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*,(Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 7.

wewenang diserahkan kepada daerah. Riondineli⁷memaparkan pentingnya desentralisasi dalam sebuah pembangunan negara karena:

1. Desentralisasi sebagai alat mengurangi kontrol kesentralan perencanaan pembangunan oleh pusat dengan adanya pendelegasian kewenangan yang lebih besar pada daerah.
2. Dengan desentralisasi daerah akan memiliki sensitifitas lebih tinggi pada masalah yang terjadi didaerahnya.
3. Desentralisasi memacu daerah lebih kreatif, inovatif, dan responsif.
4. Meningkatkan akuntabilitas birokrat dan wakil rakyat.
5. Meningkatkan partisipasi politik, sosial, ekonomi masyarakat.
6. Pelayanan publik efisien dan efektif.
7. Meningkatkan stabilitas nasional dan kesatuan.

Dengan adanya penyerahan wewenang kepada pemerintahan daerah maka dengan sendirinya membuka ruang pluralisme di daerah. Daerah sedapat mungkin untuk memiliki kepekaan yang lebih besar terhadap ruang perbedaan. Bisa saja ruang perbedaan dapat memicu konflik yang akan berakibat pada disintegrasi bangsa. Karena bagaimanapun juga Indonesia merupakan sebuah mozaik bangsa yang mejemuk yang terdapat berbagai kenaka ragam suku bangsa. Kemajemukan ini menjadi acuan kultural untuk mengelola daerah dengan konsep primodialnya daerah masing-masing. Pengelolaan daerah dilegitimasi melalui pemberlakuan otonomi daerah. Pengelolaan otonomi yang berhasil apabila dapat mewujudkan stabilitas nasional dan kesatuan dalam kaitannya dengan ruang pluralitas yang berdampak pada penguatan politik lokal yang ada.

Kalimantan Barat dan Etnis Besar yang ada di Kalimantan Barat

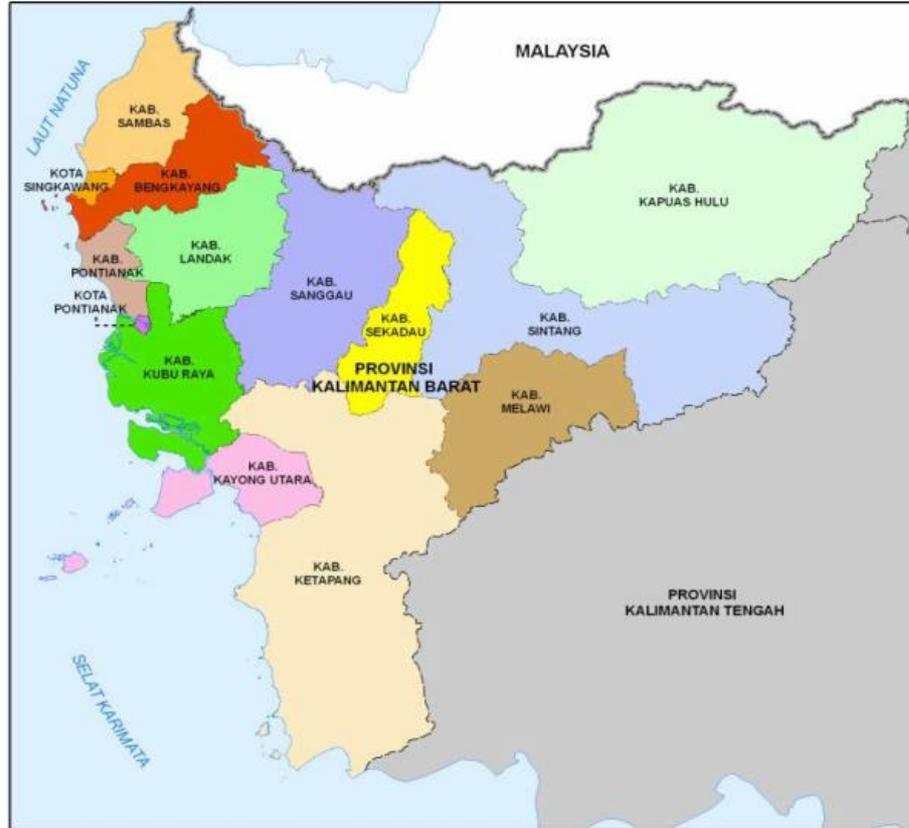
1. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan sebuah Provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Kalimantan Barat terletak pada 2^o 08' lintang utara dan 3^o 02' lintang selatan serta 108^o 30' Bujur Timur dan 114^o 10' Bujur Timur. Daerah Kalimantan Barat dilewati oleh garis lintang katulistiwa 0^o sehingga suhu udara di Kalimantan Barat cukup tinggi. Kalimantan Barat memiliki batas wilayah dimana di sebelah utara berbatasan langsung dengan Serawak (Negara Malaysia), sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan disebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata. Ada 14 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Ke empat belas kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten

⁷*Teori Desentralisasi*, kumpulan makalah studi kasus. Perpustakaan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang⁸. Berikut ini adalah peta Kalimantan Barat:

Gambar 1. Peta Kalimantan Barat



Sumber: BPS Kalimantan Barat, *Kalimantan Barat Dalam Angka 2012*, hal: ii

2. Dua Etnis Besar di Kalimantan Barat

Kalimantan Barat merupakan sebuah propinsi yang memiliki penduduk yang berasal dari etnis-etnis berbeda. Berbagai etnis tersebut adalah Dayak, Melayu, Jawa, Cina, Madura, dan Bugis. Populasi etnis yang ada di Kalimantan Barat dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Populasi Etnis di Kalimantan Barat tahun 2000⁹.

Etnis	Presentase (%)
Melayu	32,4
Dayak	33,1
Jawa	10,4
Cina	9,5

⁸BPS Kalimantan Barat, *Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2012*, (Pontianak, BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2012), 1-10.

⁹ Di edit dari Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: YOI, 2007), 462.

Madura	5,5
Bugis	3,3

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa ada dua populasi etnis besar yang memiliki presentase seimbang di Kalimantan Barat pada tahun 2000. Kedua etnis tersebut adalah etnis Melayu sebesar 32,4 % dan etnis Dayak sebesar 33,1%.

1. Etnis Melayu

Suku bangsa Melayu identik dengan agama Islam dan bahasa yang khas yang terutama dipengaruhi oleh kebudayaan Malaka, Sumatra dan ditopang oleh kebudayaan suku bangsa Semit, Saud, India dan Pakistan. Masyarakat Kalimantan pedalaman yang telah menganut agama Islam biasanya spontan bergabung di dalam suku bangsa kelompok 'pesisir' yang mengidentifikasi diri mereka sebagai suku bangsa Melayu. Di samping akibat proses Islamisasi, pembentukan atau perubahan struktur sosial di Kalimantan dipengaruhi oleh proses amalgamasi biologis. Pola kawin campur antar-suku bangsa ini tidak serta merta memunculkan suku bangsa baru dengan identitas khusus, melainkan justru memperkuat eksistensi suku bangsa yang telah ada. Misalnya saja yang terjadi adalah perkawinan antara orang Dayak dengan orang Melayu, pada akhirnya justru identitas sebagai orang Dayak yang ditinggalkannya. Meskipun demikian kedudukan orang Melayu di dalam struktur besar kehidupan di Kalimantan terutama di Kalimantan Barat bukan merupakan entitas unggulan, yang lebih prestisius dibandingkan dengan kelompok lain.

Kebanyakan etnis Melayu Kalimantan Barat umumnya menempati wilayah di sepanjang tepi sungai-sungai besar seperti sungan Kapuas, sungai Landak dan sungai Sambas. Di beberapa daerah pemukiman hulu sungai besar, orang-orang Dayak yang baru menganut Islam langsung mengikuti pola hidup orang Melayu. Proses tersebut yang disebut dengan istilah "Proses masuk Melayu" atau "Proses turun Melayu"¹⁰. Istilah Melayu di Kalimantan Barat sampai saat ini tetap bersifat inklusif karena Melayu mencakup Bugis, Arab dan Madura¹¹.

2. Etnis Dayak

Penduduk asli di Kalimantan Barat adalah orang Dayak yang terbagi dalam berbagai subetnik, sehingga mereka bukan sebuah etnis yang homogen¹². Kata dayak pada awalnya digunakan untuk menyebut penduduk asli di pedalaman pulau Kalimantan. Terutama untuk membedakannya dengan masyarakat pesisir yang umumnya memeluk agama Islam karena itu istilah dayak bukanlah nama kelompok etnis atau suku bangsa tetapi lebih ditekankan pada aspek sosio religiusnya. Kata Dayak terutama dipakai oleh orang luar untuk menyebut penduduk di pedalaman Kalimantan yang tidak beragama

¹⁰Heru Cahyono dkk, *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 49-50.

¹¹Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*(Jakarta : YOI, 2007), 102.

¹² Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*(Jakarta: LIPI Press, 2007), 88.

Islam. Masyarakat suku-suku bangsa di Kalimantan di pedalaman Kalimantan itu sendiri lebih suka disebut orang Daya. Kata ini mungkin berasal dari bahasa Iban yang berarti manusia. Ada juga yang mengartikan pedalaman atau hulu. Selain mengembangkan system religi asli dari warisan nenek moyang mereka. Pada masa sekarang orang Dayak di pedalaman banyak yang sudah beragama Kristen berkat kegiatan misi dan Zending yang mampu mencapai daerah-daerah terpencil¹³.

B. Oposisi biner yang berkembang : Dayak (Non Muslim) vs Melayu (Muslim)

Hubungan sosial masyarakat Dayak dengan kelompok lain, Melayu khususnya, melalui perkawinan melahirkan kelompok baru yakni mereka yang keturunan (Dayak) beragama Islam. Tidak ada permasalahan jika konsep etnisitas dikaitkan dengan keturunan darah dan kelahiran. Tetapi di Kalimantan Barat hal ini menjadi lain, ada fenomena khas yang menarik di Kalimantan Barat, yang berbeda dengan Kalimantan di bagian lain. Bahwa mereka (Dayak) yang menikah dan masuk Islam konon tidak mengakui dan tidak diakui lagi sebagai orang Dayak. Pernikahan pihak Dayak dengan pihak Melayu, dan yang (selalu) diikuti dengan perpindahan agama disebut orang yang masuk sebagai Melayu. Ada oposisi biner yang tumbuh di sana, bahwa Dayak itu adalah non-muslim dan Melayu adalah muslim. Ketika orang Dayak masuk Islam dalam kasus perkawinan misalnya, maka orang itu dianggap masuk Melayu. Di Kalbar, sejauh catatan dan anggapan yang berkembang, seorang Dayak yang masuk Islam kehilangan (dihilangkan) status dirinya sebagai orang Dayak¹⁴.

Jika dilihat dari pandangan instrumental, maka akan ada dua fokus untuk melihat politik etnisitas. Yaitu versi pertama yang fokus pada kompetisi antar elit untuk memperoleh sumberdaya dan usaha memanipulasi simbol untuk mendapatkan dukungan massa dan meraih tujuan politik yang hendak dicapai elit (Brass, 1991; Cohen, 1974). Hal ini terlihat dalam usaha orang Melayu berkompetisi dengan orang Dayak serta memanipulasi simbol dan mempertegas identitas kemelayuan mereka. Hal tersebut membuat berkembangnya “kesenjangan” dengan orang dayak. MABM membangun Rumah Melayu di tingkat provinsi dan kabupaten, dan mendorong orang-orang Melayu agar mengenakan busana telok belanga dalam festival-festival dan event-event keagamaan. Personil MABM melobi pemerintah untuk memasukkan lebih banyak simbol Melayu seperti warna kuning dan perahu tradisional lancang kuning di gapura masuk gedung-gedung pemerintahan.

Versi kedua fokus pada strategi elit untuk memaksimalkan pilihan-pilihan rasional dalam ‘*given situation*’. Tujuan elit adalah meraih kekuasaan, status; untuk itu ia bergabung dalam komunitas, baik komunitas etnis maupun komunitas nasional dengan harapan komunitas tersebut akan menjamin tercapainya tujuan, baik dengan mempengaruhi negara atau dalam situasi tertentu melalui pemisahan diri (Banton, 1983, 1994; Hecter, 19886, 1992). Orang Melayu pada mulanya lamban dalam menanggapi menguatnya lobi politik Dayak. Sejarah Kalimantan

¹³Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta:LP3ES, 1997), 80-81.

¹⁴Budi Susanto S.J, *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 114.

Barat mengungkapkan bahwa orang Melayu tidak memiliki insentif untuk membentuk organisasi etnis formal karena mereka sudah menikmati status sebagai kelompok etnis berpengaruh. Bahkan di puncak kejayaan Persatuan Dayak (PD) dan Partindo yang merupakan partai nasional sayap kiri pada tahun 1950an - 1960an orang-orang Melayu tetap menjadi mayoritas dalam birokrasi dan parlemen.

Etnis Melayu mulai menanggapi menguatnya lobi politik yang dilakukan etnis dayak di era 1990an dengan cara mendirikan Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) pada bulan April 1997. Cikal bakal MABM adalah dari asosiasi serupa yang lebih dulu terbentuk di kabupaten Sambas dan Ketapang. MABM bertujuan mewakili kepentingan orang Melayu di tingkat provinsi. Salah satu pembentukan MABM adalah pemerintah kesulitan mencari organisasi Melayu di tingkat provinsi untuk diikutkan dalam konferensi atau pertemuan Melayu regional. MABM bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu dan membangkitkan kembali budaya Melayu, yang telah lama pudar setelah bubarnya kesultanan Melayu dan tenggelam di bawah budaya nasional orde baru. Kelahiran Majelis itu juga terkait dengan ketegangan yang semakin meruncing akibat konflik etnis pada tahun 1996-1997. Orang-orang Melayu menandingi gerakan politik Dayak pada waktu itu.

Tahun-tahun pertama MABM dipakai untuk konsolidasi organisasi. Ia mendirikan cabang-cabang di tingkat kabupaten dan memfokuskan diri pada upaya mendapatkan pengakuan dari orang Melayu. Ia mempertahankan sikap *low profile* selama periode transisi 1997-1998. Tak satupun dari kebijaksanaan-kebijaksanaan MABM bertentangan langsung dengan orang Dayak, sebaliknya sejak pendirian MABM selalu berusaha bersikap bersahabat pada saingannya. Misalnya, ia terus menghadiri festival-festival Gawai Dayak di tingkat provinsi dan berpartisipasi dalam forum-forum rekonsiliasi yang diorganisir oleh orang Dayak.

Selama krisis 1998 di Kalbar, bersama-sama dengan asosiasi etnis lain, MABM tampil berkali-kali di Koran-koran untuk menggaris bawahi pentingnya solidaritas dan persatuan di antara kelompok etnis. Belakangan keberadaan MABM secara tidak langsung mendorong resistensi terhadap orang Dayak seperti yang terjadi dalam perselisihan mengenai wakil-wakil utusan daerah, MPR pada bulan Oktober 1999. Profil MABM juga melejit setelah kerusuhan antara orang Dayak dengan orang Madura pada tahun 1999-2000. Salah satu aktor dalam konflik itu adalah forum komunikasi pemuda Melayu (FKPM). Sebuah organisasi pemuda yang mempunyai hubungan konsultatif dengan MABM. Meskipun tidak bereaksi banyak pada pemilihan bupati 1998 dan 1999, MABM aktif mempromosikan kepentingan-kepentingan Melayu dalam pemilihan setelah itu.

Ada tuntutan dari elit Melayu agar ada pembagian kekuasaan antara etnis melayu dan etnis dayak¹⁵. Dengan kata lain jika orang Dayak yang menjadi bupati, maka orang Melayu yang menjadi wakilnya, begitu pula sebaliknya. Kondisi ini mulanya terjadi di Bengkayang, dan Landak yang didominasi oleh

¹⁵Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: YOI, 2007), 480.

Etnis Dayak, serta di Sambas dan Pontianak yang didominasi Etnis Melayu. Hal serupa juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang memiliki komposisi etnis berimbang seperti di Ketapang dan Kapuas Hulu. Di Kabupaten Sanggau, MABM memberikan sebuah peringatan dalam pemilihan bupati 2003 agar DPRD tidak memilih bupati dan wakil bupati yang keduanya tidak boleh berasal dari orang Dayak. Ia menyodorkan semua kandidat Melayu untuk wakil bupati, untuk dipasangkan dengan calon bupati Dayak. Beberapa pengamat yang melihat kondisi ini berasumsi bahwa di Sanggau, Bengkayang, dan Pontianak segala urusan bisa selesai jika pemerintahan dipegang oleh orang Dayak-Melayu¹⁶.

Kasus yang terjadi di Landak dan di Sanggau, MABM menolak penerapan hukum adat. Bagi MABM, hukum nasional harus diutamakan dari hukum adat, dan hukum adat seharusnya hanya diterapkan pada kelompok etnis yang bersangkutan untuk memperluas pengaruhnya. Dalam hal ini, MABM memelihara hubungan dengan beberapa kesultanan Melayu yang baru saja dihidupkan kembali maupun organisasi-organisasi politik, partai-partai politik, forum-forum dan universitas-universitas, tujuannya adalah untuk membangun koalisi yang lebih kuat dalam menghadapi lobi orang Dayak.¹⁷ Menurut Davidson, bagi kaum elite Melayu kebangkitan Melayu dengan sendirinya akan menimpali semakin majunya orang Dayak. Jadi, persaingan politis Melayu Dayak bukan hanya sentimen anti Madura belaka, yang menjadi inti pembakaran dan perusakan yang terjadi pada tahun 1999.¹⁸

C. Kesimpulan

Etnisitas merupakan salah satu bagian untuk menunjukkan sebuah identitas. Keberadaan etnisitas tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang alamiah atau bawahan dari lahir berdasarkan fakta-fakta yang telah ada, akan tetapi identitas merupakan sebuah hasil konstruksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Seperti yang dijelaskan pada bagian di atas dengan melihat pada etnis terkonstruksi dalam kompetisi untuk mengakses sumber daya dan kekuasaan.

Etnis melayu digambarkan pada tulisan ini, dalam eksistensinya untuk berkompetisi dengan etnisi dayak dengan memainkan simbol-simbol yang mereka miliki di Kalimantan Barat. Hal ini tak lepas dari peranan menguatnya arus desentralisasi yang memberi kesempatan kepada lokal yang di kongkritkan oleh pemerintah daerah itu sendiri untuk mengelola rumah tangga daerahnya. Dalam hal ini, terdapat persaingan dari berbagai etnis yang ada untuk menjadi pemerintah daerah.

¹⁶ Muhtar Haboddin, "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal," *Jurnal Studi Pemerintahan*, Vol. 3. No. 1, (2012), 121.

¹⁷ Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: YOI, 2007), 487-499.

¹⁸ J.S Davidson, "Violence and Politics in West Kalimantan, Indonesia," (Tesis PhD, University of Washington, 2002), 320. Dalam Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta : YOI, 2007), 102.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. *Cultural Studies : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2008.
- BPS Kalimantan Barat. *Kalimantan Barat dalam Angka tahun 2012*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat. 2012.
- Cahyono, Heru dkk. *Konflik Kalbar dan Kalteng: Jalan Panjang Meretas Perdamaian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Haboddin, Muhtar. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintahan*. Vol, 3. No. 1. (2012): 109-126.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 1997.
- Klinken, Gerry Van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi. 2012.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007.
- Sjaf, Soyjan dkk. "Pembentukan Identitas Etnis di Arena Ekonomi Politik Lokal." *Jurnal Sosial Pedesaan Vol 6. No.2*. (2012), 159-178.
- Suprayitno, S., Putri, F.P.P., Triyani, T. (2019). *Strategy on the National Unity and Politics Agency (KESBANGPOL) in Maintaining Ethnicity and Religious Relations Based on Huma Betang Philosophy in Central Kalimantan*. Budapest Internasional Research And Critics Institute Journal (Birci-Journal. 2(3). 229-238. DOI : <https://doi.org/10.33258/birci.v2i4.629>
- Susanto, Budi. *Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 2003.
- Tilaar. *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada. 2007.
- Tirtosudarmo, Riwanto. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: LIPI Press. 2007.
- Vick dan Ishiyama. *Etnis dan Politik Identitas*. Jakarta: Kencana. 2013.
- Teori Desentralisasi, kumpulan makalah studi kasus. Perpustakaan S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.